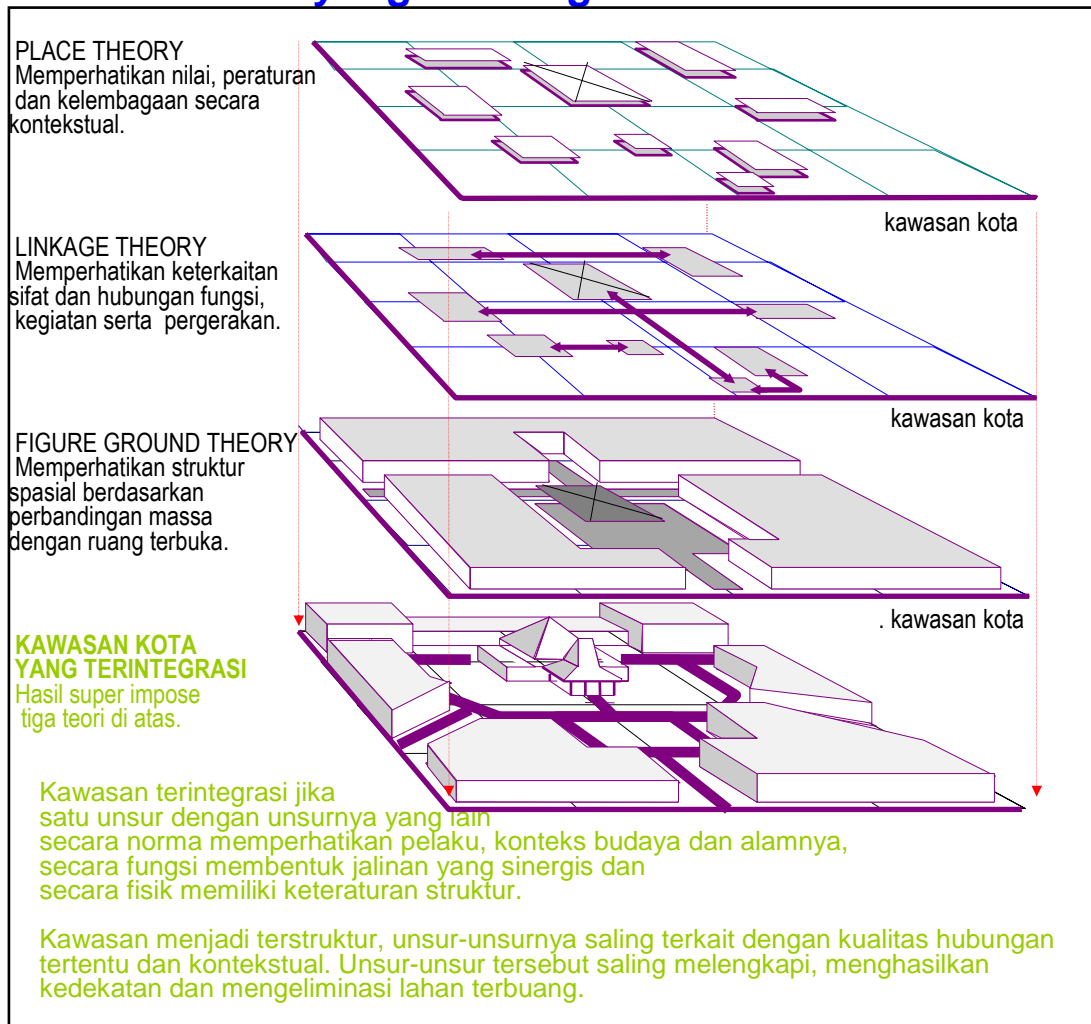


Kawasan Kota yang Terintegrasi



Sumber: Pengolahan, berdasarkan Trancik (1986: 98)

Pendekatan Faktor-Faktor Pengintegrasian

Tujuan pendekatan ini adalah memahami **faktor-faktor** yang menentukan dalam pengintegrasian kawasan kota berdasarkan pengertian sistem. Kawasan kota adalah sistem yang mengandung pertalian antar unsur pelaku, fungsi dan penghubung. Kota sebagai satu sistem, menyebabkan perubahan yang terjadi pada satu bagian berpengaruh pada keseluruhan sistem (Churchman, 1957; Ashby, 1956 dalam Djoko Sujarto, 1995). Berbagai kepentingan secara dinamik terjalin (Redstone, 1976: 19) sehingga pola inhabitasi dan artifak kota menjadi khas.

Kawasan kota yang terintegrasi dapat diwujudkan dengan membuat pertalian positif antar unsur dalam kawasan dengan merespon kebutuhan masyarakat sebagai pelaku, hubungan fungsi yang berkualitas dan diterapkan oleh kombinasi spasialnya (Trancik, 1986: 219). Kawasan yang baik berarti ada sinkronisasi secara ideal, sosial, material (Koentjaraningrat, 1981) atau dibentuk menjadi *imageable: visible, coherent* dan *clear/legible* (Lynch, 1992: 10, 91-117). Berdasarkan pengertian sistem kawasan kota di atas maka faktor-faktor integrasi akan mencakup faktor norma yang berkaitan dengan unsur pelaku, faktor fungsi yang berkaitan dengan unsur fungsi kegiatan dan faktor fisik yang berkaitan dengan unsur penghubung.

Pendekatan Faktor Kawasan Kota yang Terintegrasi

Sistem Kota (Djoko Sujarto, 1995)	Kebudayaan (Koentjaraningrat, 1981)	Bentuk Kota (Lynch, 1992)	Ruang Kota (Trancik, 1986)	Faktor-faktor Peng-integrasian
☑ Pelaku	☑ Ideal	☑ Imageable/ ☑ Visible	☑ Place	1.NORMA 2.FUNGSI 3.FISIK
☑ Fungsi kegiatan	☑ Sosial	☑ Coherent Structure	☑ Linkage	
☑ Penghubung: sarana/prasarana	☑ Material	☑ Clear/ legible	☑ FigureGround:mas s-a-r.terbuka	

Faktor norma memperhatikan kepentingan masyarakat sebagai pelaku. Masyarakat membentuk kawasan kota sebagai transformasi pemaknaan terhadap alam dan realitas lingkungan (Wiryomartono, 1995: 14) dengan perilaku dan budayanya. Kawasan kota yang dibentuk sesuai norma masyarakat akan lebih imageable atau dapat diterima. Faktor norma berkaitan dengan pola atau standard perilaku masyarakat memiliki komponen-komponen nilai budaya, peraturan dan kelembagaan.

Faktor fungsi memperhatikan kepentingan fungsi kegiatan. Kawasan kota berfungsi mewadahi kegiatan masyarakat. Kegiatan yang dilakukan masyarakat banyak bertalian satu dan lainnya. Berdasarkan aspek ini, kegiatan sosial dan ekonomi serta politik menjadi esensi dalam pembentukan kota. Perubahan dalam kegiatan akan mempengaruhi fungsi kawasan. Faktor fungsi berkaitan dengan fungsi kawasan kota dalam mewadahi kegiatan-kegiatan inhabitasi memiliki komponen-komponen esensi kegiatan, keterkaitan kegiatan dan tingkat kegunaan.

Faktor fisik memperhatikan bentuk-bentuk fisik. Pengaturan fisik ruang kota dilakukan untuk menyesuaikan kepada kegiatan yang ditampung dan norma masyarakat. Pengaturan fisik menghasilkan struktur kota serta bentukan fisik lain seperti kualitas visual dan termasuk detail. Faktor fisik berkaitan dengan wujud fisik kawasan kota memiliki komponen-komponen spasial, visual dan detail.

Persyaratan Pengintegrasian

Persyaratan pengintegrasian perlu diketahui untuk melakukan identifikasi terhadap kondisi pengintegrasian suatu kawasan kota. Persyaratan pengintegrasian ini digali dari *The Place Theory*, *The Linkage Theory* dan *The Figure Ground Theory* (Trancik, 1986). Teori-teori ini analog dengan pengertian sistem kota yang digunakan untuk pendekatan faktor-faktor integrasi di muka.

The Place Theory berkaitan dengan faktor norma. Esensi dari teori ini terletak pada pemahaman karakter masyarakat dan budayanya, pada sejarah setempat, rasa dan keinginan masyarakat, pada tradisi dan pada realitas ekonomi dan politik (Trancik, 1986: 112-114). *The Place Theory* mempersyaratkan pembentukan kawasan harus sesuai dengan masyarakat dan alamnya. Fisik dan kegiatan diletakkan pada *setting*-nya sesuai dengan keberadaan masyarakat serta nilai sosial budayanya.

Kawasan kota yang terintegrasi dengan demikian adalah kawasan yang didasari norma yang kontekstual dengan perilaku masyarakat, budaya dan tempatnya. Komponen-komponen pengintegrasian pada faktor norma (nilai budaya, peraturan, kelembagaan) dipersyaratkan:

- 1) Menggambarkan nilai budaya dan perilaku dalam rasa, cipta, karsa. Kawasan harus menghubungkan fisik dengan konteks budayanya dan memperhatikan keinginan dan aspirasi masyarakat (Trancik, 1986:114).

- 2) Mematuhi pranata sesuai dengan lingkungan alam dan realitas sosial. Kawasan dirasa baik jika terdapat kesesuaian batasan dengan potensi pemaknaan dan tuntutan masyarakat setempat serta dihindari zoning di luar keinginan dan konteks masyarakatnya (Peter Simthson, 1981 dalam Trancik, 1986: 115)
- 3) Mengakomodasi bentuk komunitas sosial dan organisasi kemasyarakatan. Kawasan dapat digunakan setiap orang dan masyarakat yang beragam (Trancik, 1986: 123).

The Linkage Theory berkaitan dengan faktor fungsi. *The Linkage Theory* mempersyaratkan adanya garis penghubung fungsional antar elemen di dalam kawasan kota (Trancik, 1986: 106). Esensi fungsi dalam sistem kota harus diperhatikan. Garis dapat berbentuk jalan, ruang terbuka linier, atau bentuk lain yang menyatukan fungsi kegiatan antar elemen. Dengan dasar ini dapat dibuat kesatuan sistem antar kegiatan secara koheren sehingga hubungan atau pergerakannya menjadi efisien.

Kawasan kota yang terintegrasi dengan demikian adalah kawasan yang unsur-unsurnya secara fungsi terjalin sinergis. Komponen-komponen pengintegrasian pada faktor fungsi (esensi kegiatan, keterkaitan kegiatan, tingkat kegunaan) dipersyaratkan:

- 1) Mewadahi kegiatan-kegiatan yang diperlukan bagi inhabitasi. Kawasan harus merespon kepada dinamika penggunaan sosial masyarakat. (Trancik, 1986: 219)
- 2) Menjalinkan kegiatan berdasarkan hubungan fungsi dan sifatnya. Dalam kawasan Setiap kegiatan dihubungkan secara komprehensif sehingga menyatu. (Maki dalam Trancik, 1986: 106; Bourne, 1978: 263).
- 3) Fungsi yang optimal karena efisiensi, keefektifan dan kemudahan. Kawasan yang terintegrasi seharusnya menciptakan kedekatan, yang juga akan mengeliminasi sumber daya ruang dan energi dengan menyambungkan berbagai kegiatan (Trancik, 1986: 220).

The Figure Ground Theory berkaitan dengan faktor fisik. *The Figure Ground Theory* mempersyaratkan adanya kejelasan struktur dan sekuen dalam ruang kota. Dengan demikian pola komposisi ruang terbuka dan massa bangunan dapat dimanipulasi untuk memperjelas struktur ruang kota. Hirarki misal diciptakan dengan dasar perbandingan ukuran dan bentuk geometri ruangnya (Trancik, 1986: 97). Di sini komponen pewardahan dalam sistem kota harus diperhatikan termasuk aspek spasial, visual dan detail.

Kawasan kota yang terintegrasi dengan demikian adalah kawasan yang unsur-unsurnya secara fisik membentuk struktur ruang yang teratur dan menyatu. Komponen-komponen pengintegrasian pada faktor fisik (spasial, visual dan detail) dipersyaratkan:

- 1) Ruang kawasan yang terstruktur dan hirarkis. Semua fragmen dihubungkan dalam kerangka yang berkarakter; menyatu dan seimbang di dalam struktur kawasan (Trancik, 1986: 106; Lang, 1994: 418).
- 2) Bentuk visual yang fungsional, analogis dan estetis. Unsur-unsur masif harus berfungsi dalam membentuk pola kawasan, menghadirkan ekspresi lokal yang signifikan dengan bentuk visual dan letaknya. (Trancik, 1986: 101).
- 3) Memperkuat fungsi dan karakter dengan mengolah bentuk dan aksentuasi. Kawasan misalnya diperjelas struktur dan ordernya (Trancik 1986: 103).